PROSES PEMEKARAN KECAMATAN PANCUNG SOAL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)

OLEH:

RIO ARNANDA

55325 /2010

PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Proses Pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama	**: Rio Arnanda**
NIM/ BP	**: 55325/2010**
Program Studi	**: Pendidikan Sosiologi Antropologi**
Jurusan	**: Sosiologi**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Nora Susilawati, S.Sos., M.Si	**Delmira Syafrini, S.Sos., M.A**
NIP. 19730809 199802 2 001	**NIP. 19830518 200912 2 004**

Mengetahui,
Dekan FIS Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP.19621001 1989031002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Jum'at, 05 Agustus 2016

Proses Pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Rio Arnanda
BP/NIM : 2010/55325
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji Nama		**Tanda Tangan**
1. Ketua	**: Nora Susilawati, S.Sos., M.Si**	
2. Sekretaris	**: Delmira Syafrini, S.Sos., M.A**	
3. Anggota	**: Junaidi, S.Pd., M.Si**	
4. Anggota	**: Dr. Erianjoni, M.Si**	
5. Anggota	**: Erda Fitriani, S.Sos., M.Si**	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Arnanda

BP/NIM : 2010/55325

Prodi : Pendidikan. Sosiologi-Antropologi

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul "Proses Pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi

Nora Susilawati, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Pembuat Pernyataan.

Rio Arnanda
NIM/BP. 55325/2010

ABSTRAK

Rio Arnanda. 55325/2010. Proses Pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan. *Skripsi.* Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi,Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Pemekaran Kecamatan Pancung Soal telah berlangsung sejak tahun 2011. Dalam proses pemekaran terjadi banyak permasalahan termasuk pro dan kontra mengenai pemekaran Kecamatan Pancung Soal. Pada tanggal 13 September 2013 muncul kesepakatan oleh pemerintah dan masyarakat dengan membutuhkan proses yang sangat panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Teori yang dipakai dalam menganalisis permasalahan ini adalah teori Struktural Fungsional pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons Teori Struktural Fungsionalisme yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Teori struktural fungsional Talcott Parson dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistim "tindakan" yang disebut AGIL.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus instrinsik, dimana pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*) yang berjumlah 27 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis interaktif dengan langkah–langkah reduksi data, penyajian data, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan melalui 3 tahapan diantaranya *pertama,* tahap sosialisasi terjadi dua kali, diantaranya diawali dengan munculnya surat edaran Pemerintah Kecamatan ke kantor walinagari yang ada di Kecamatan Pancung Soal dan mengumpulkan Wali Nagari, Alim ulama, Niniak Mamak, Dan Kaum Adat. *Kedua,* tahap musyawarah, musyawarah terjadi tiga kali diantaranya musywarah pro dan kontra tentang pemekaran Kecamatan Pancung Soal, musyawarah persetujuan pemekaran Kecamatan Pancung Soal dan penetapan pusat kantor Kecamatan Air Pura. *Ketiga*, tahap pemekaran, setelah tokoh masyarakat setuju masyarakat pun mendukung, sehingga terjadi pemekaran dari 1 Nagari menjadi 8 Nagari sampai dengan 8 Nagari menjadi 20 Nagari sehingga berjumlah 20 Nagari di Kecamatan Pancung Soal. Dua puluh Nagari terebut dibagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura. Berdasarkan hasil penelitian pemekaran wilayah tersebut juga memunculkan berbagai dampak dan perubahan setelah pemekaran Kecamatan Pancung Soal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan". Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susila wati, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing I dan Ibu Delmira Syafrini, S.Sos., M.A sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi, S.Pd. M,Si, Dr. Erianjoni, M.Si, Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si., dan Pak Reno Fernandes S.Pd, M.Pd, sebagai tim penguji yang banyak memberikan saran dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si sebagai ketua Jurusan Sosiologi, Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si., sebagai sekretaris Jurusan Sosiologi, dan Bapak Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan dukungan moril maupun materil dari keluarga kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Selanjutnya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi, khususnya angkatan 2010 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada informan dan instansi terkait yang telah bersedia memberikan data dan informasinya, sehingga penulis dapat menuliskannya ke dalam skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, do'a, serta pengorbanan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari-Nya.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis sangat menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan saran dari segenap pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya, dan penulis khususnya.

Padang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka teori 11

F. Batasan Konseptual 16

1. Pemekaran Daerah 16

2. Proses 16

G. Metode penelitian 18

a. Lokasi Penelitian 18

b. Pendekatan dan Tipe Penelitian 18

c. Informan penelitian 19

H. Teknik pengumpulan Data 20

a. Observasi 20

b. Wawancara 22

c. Dokumentasi 25

I. Triangulasi data 25

J. Analisis Data 26

BAB II KECAMATAN PANCUNG SOAL DAN KECAMATAN AIR PURA

A. Kecamatan Pancung Soal 29
1. Sejarah Kecamatan Pancung Soal 29
2. Kondisi Geografis dan Demografis 30
3. Struktur Organisasi Pemerintahan 33

B. Kecamatan Air Pura 35
1. Sejarah Kecamatan Air Pura 35
2. Letak dan Luas Wilayah 36
3. Kondisi Demografis 37
4. Ekonomi Masyarakat 37
5. Agama 38
6. Struktur organisasi Pemerintahan 38
7. Pendidikan 40

BAB III PROSES PEMEKARAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

A. Tahap Sosialisasi 42
1. Penyebaran surat edaran dari Pemda Kecamatan 42
2. Melalui dialogi 45

B. Tahap Musyawarah 54
1. Musyawarah pro dan kontra 54
2. Musyawarah penetapan pemerintahan Kecamatan Air Pura
…….. 56

C. Tahap Pemekaran..... 58
a. Tahap pemekaran dari satu Nagari menjadi Delapan Nagari
……..... 58
b. Tahap pemekaran dari delapan nagari menjadi dua puluh nagari
……... 60
c. Dampak pemekaran 67
d. Perubahan yang muncul setelah pemekaran 73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA..... 79

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Administrasi Nagari Kecamatan Air Pura.....7

Tabel 2.1 Jumlah penduduk 31

Tabel 2.2 Sekolah yang ada di Kecamatan Air Pura …….40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman..... . 28

Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Pancung Soal …… 33

Gambar 3 struktur Organisasi Kecamatan Air Pura 39

Gambar 4 Ekonomi masyarakat Kecamatan Pancung Soal 52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman Observasi
4. Daftar Nama Informan Penelitian
5. Surat/SK Pembimbing
6. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
7. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).Soepomo (sebagaimana dikutip oleh Napitupulu dalam buku *The Liang Gie*, 1977) dalam Elpina, 2012 :7 menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri dalam kadar Negara kesatuan.Indonesia sedang berada ditengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai perubahan Undang-undang No 22 tahun 1999, selain merupakan panduan

yang nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan politik hukum otonomi daerah. Dasar kekuatan tersebut pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam kebijakan yang terukur, terarah, dan terencana oleh pemerintahan pusat. Kebijakan demikian perlu dilakukan agar konsep pelaksanaan otonomi daerah tetap berada pada panduan dan garis politik hukum Nasional.[1]

Semenjak Undang-undang otonomi disahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ini, menyebabkan munculnya keinginan berbagai daerah untuk memekarkan wilayah Kabupaten maupun Kecamatan. Pemekaran merupakan solusi tepat untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia dalam pembinaan sosial kemasyarakatan. Intinya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam mengurus daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat juga bisa dilakukan dengan cara pengembangan wilayah atau pemekaran Kecamatan.[2]

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat

[1].Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 2008. Jakarta. Sinar Grafika

[2]Bakarudin.2012. *Pengantar Geografi Kota dan Desa*. Padang: Jurusan Pendidikan Geografi.

menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.[3]

Salah-satu daerah yang terjadi pemekaran adalah Provinsi Sumatera Barat. ProvinsiSumatra Barat merupakan provinsi yang tarletak di Pesisir Barat Pulau Sumatera dan dikenal dengan kampong orang Minangkabau. Sudah lama provinsi ini diakui memiliki banyak kekhasan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia, bak dari latar belakang sejarah, budaya, adat istiadat, dan sosial kemasyarakatan. Maka tak heran muncul opini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai DIM (Daerah Istimewa Minang Kabau). Tak ada salahnya bila sekarang hendak memunculkan ide untuk memunculkan opini tentang pemekaran wilayah daerah otonomi khusus Sumbar.

Pemekaran wilayah di Sumbar termasuk salah-satunya Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km^2 dan populasi lebih kurang 420.000 jiwa. Ibukot Kabupaten Pesisir Selatan adalah Painan. Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Solok dan Provinsi Jambi, sebalah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan sebalah Barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari dari lima belas (15) kecamatan yaitu Koto XI Taruzan, Bayang, Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung

[3]Deddy, Supriady dan Dadang, Sobbin, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Daerah*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.

Soal, Air Pura, Basa IV Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.

Kecamatan Pancung Soal merupakan salah-satu yang telah dimekarkan dengan munculnya kecamatan baru yaitu Kecamatan Air Pura. Bersesuaian dengan faktor di atas Kecamatan pancung soal berbatasan denganKecematan Linggo Sari Baganti (Utara) berbatasan dengan Kecamatan Basa Ampek Balai (Selatan) berbatasan dengan Samudra Hindia (Barat) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hutan TNKS. Alasan Kecamatan Pancung Soal dimekarkan, *Pertama* selain daerah yang luas juga memiliki potensi daerah yang baik dalam bidang perkebunan sawit. *Kedua,* Kecamatan Pancung Soal khususnya dibagian paling Barat yang akan dimekarkan tersebut memiliki potensi-potensi Sumber Daya Alam yang bagus untuk dikembangkan, baik dilihat dari segi pertanian maupun perikanan. Dari segi pertanian, dibagian paling Barat menonjol dengan penghasilan kelapa sawitnya. Ketiga, dahulu jalan raya di Kecamatan Pancung Soal termasuk memprihatinkan, sekarang sudah mulai membaik dan tertatah rapi.[4]

Dilihat dari ketentuan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, secara administratif, teknis dan fisik kewilayahan pemekaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan ini boleh dibilang memenuhi syarat. Sebanyak 11 faktor dan 35 indikator yang ditentukan Peraturan Pemerintahan (PP), sebagian besar terpenuhi. Antara lain, faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial

[4]Arsip dokumen Kecamatan Pancung Soal

politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamata Air Pura, Bupati Pesisir Selatan menimbang[5]:

> *"Bahwa untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mengusulkan pembentukan kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan serta memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesbilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya maka dipandang perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Pancung Soal".*
> *"Bahwa pemekaran kecamatan tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah agar berhasil guna dan berdaya guna".*

Faktor utama pendorong pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut: (1) motif untuk efektifitas administrasi pemerintahan mengingat daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan adanya ketinggalan dalam pembangunan, (2) pemekaran daerah didasari motif ingin lepas dari himpitan penindasan kelompok lain atas dasar etnis, agama dan lainnya, (3) adanya kemanjaan fiskal dijamin UU dengan disediakannya hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) dan disediakan sumber pendapatan daerah, (4) pemekaran daerah banyak didasari motif karena ingin menjabat di birokrasi lokal dan DPRD. Selain itu pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura juga didasari

[5] Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Air Pura

motif untuk membangun kembali sejarah dan kekuasaan lama yang pernah pudar dimasa lalu.[6]

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Burhanuddin (58 tahun) yang bekerja sebagai sekretaris di Kecamatan Air Pura menjelaskan bahwa pemekaran tersebut menyebabkan terjadi perubahan sistem pemerintahan. Dulunya masyarakat Air Pura bagian dari Kecamatan Pancung Soal dengan Pemekaran masyarakat Air Pura sudah dipimpin oleh pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Pancung Soal. Dengan pemekaran tersebut harus menyesuaikan diri dalam mencapai tujuannya masyarakat harus bersatu dan bekerja sama dalam memilih alat dan cara untuk pembangunan daerah.

Menurut Pak Nazirwin (42tahun) yang bekerja sebagai seksi kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa tujuan Pemekaran daerah adalah (1) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteran kepada masyarakat, (2) Memperkokoh basis ekonomi rakyat, (3) Mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, (4) Membuka peluang dan lapangan pekerjaan (5) Memberikan peluang daerah mendapatkan Investor secara langsung. Sedangkan menurut Pak Apral yang bekerja sebagai seksi administrasi kependidikan menjelaskan tujuan dilakukannya pemekaran wilayah atau daerah adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan pemerintah, serta untuk melaksanakan pemerintahan setingkat Kabupaten otonom dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya (Alam dan Manusia) yang tersedia.dengan kata lain tujuan

[6] Haw, Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

utama pemekaran adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui: (1) Optimalisasi penggalian dan pemanfaatan potensi yang ada dan tersedia, (2) meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, (3) menghidupkan sentra-sentra produksi guna meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang demokratis, (4) meningkatkan keamanan dan ketertiban, (5) meningkatkan jalinan hubungan kerjasama antara kota dan desa maupun pusat dan saerah, (6) meningkatkan penyebaran pemerintahan hasil-hasil pembangunan daerah selain diberi wewenang untuk mengatur, serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat,juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah.

Pada tanggal 13 September 2013, Kecamatan Pancung Soal dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura. Adapun nagari yang termasuk dalam Kecamatan Air Pura, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Administrasi Nagari Yang dimekarkan Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015

	Nama / Jumlah				Luas Wilayah (Km^2)
	Kecamatan	No	Pemerintahan Nagari	Jumlah Kampung	
1	Airpura	1	Indra pura Utara	2	8
		2	Muara Indra Pura	2	15
		3	Damur Lapan Batang Indra Pura	2	37
		4	Lalng Panjang Indra Pura	2	29
		5	Palokan Indra Pura	2	38

		6	Lubuk Betung Indra Pura	2	47
		7	Teluk kualo Indra Pura	2	48
		8	Tanah Bakali Indra Pura	2	31
		9	Indra Pura Timur	2	12
		10	Pulau Rajo Indra Pura	2	49
∑				**20**	**314**

Sumber : Arsip Dokumen Kecamatan Air Pura Tahun 2015

Dari tabel diatas Kecamatan Air Pura luas wilayahnya 314 km^2. Kecamatan Air pura terdapat sepuluh nagari dintaranya : Inderapura Utara, Muara Inderapura, Damar lapan Inderapura, Lalang panjang Indera Pura, Palokan Inderapura, Lubuk Betung Inderapura, Tluk Kualo Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Inderapura Timur dan Pulau Rajo Indera Pura.

Dari pemekaran di Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura memberikan perubahan kepada masyarakat Kecamatan Air Pura berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat beberapa perubahan yang muncul adalah *pertama,* berpindahnya pusat pemerintahan Kecamatan Air Pura dulunya bagian Kecamatan Pancung Soal yang berpusat di Indrapura sekarang dengan dimekarkannya Kecamatan Air Pura yang berpusat di Nagari Tanah Bakali. *Kedua,* dalam pengurusan dan pembuatan kartu tanda penduduk dan banyak urusan lainnya sudah dbantu oleh Kantor Wali Nagari yang telah dibangun di masing Nagari yang telah dimekarkan karena dulunya untuk menuju ke Kecamatan Pancung Soal banyak jalan yang rusak dan berkelok-kelok di daerah masyarakat yang tinggal pedalaman dan perkebunan sawit, itu pun jika urusan sehari tuntas, karena belum ada kantor Wali Nagari di daerah pedalaman dan

perkebunan sawit yang sangat jauh dari Kecamatan Pancung Soal. Setelah dimekarkan menjadi Kecamatan Air Pura sudah banyak didirikan kantor Wali Nagari sehingga dalam pembuatan KTP dan urusan lainnya masyarakat sudah dipermudah menyelesaikan urusannya.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini tentang wilayah adalah Feni Sandra (2013) berjudul "Pemekaran Kecamatan Sungai Bremas : Lahirnya Kecamatan Koto Balingka". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa lahirnya Kecamatan Koto Balingka merupakan perjuangan yang sangat panjang dan juga suatu peristiwa yang sangat unik karena lahirnya Kecamatan Koto Balingka merupakan hasil suatu tuntutan masyarakat terhadap konflik yang terjadi antara Nagari Air Bangis dengan Nagari Parit yang berawal dari permasalahan antar siswa pelajar dengan adanya tuntutan warga masyarakat Parit terhadap Bupati maka dibentuklah Kecamatan baru dengan nama Kecamatan Koto Balingka. Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan[7].

Penelitian lain yang relevan Sulastri (2013) berjudul "Pemekaran Kecamatan Sungai Pagu lahirnya : Pauh Duo di Kabupaten Solok Selatan" . hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa setelah dibentuknya Kecamatan Pauh Duo ini perkembangan penduduk Kecamatan Puh Duo dengan penduduk wilayah lainnya kegiatan interaksi sosial banyak menghasilkan berbagai dampak, baik postif, baik dalam kegiatan pendidikan, maupun dalam kegiatan kesehatan dan sosial lainnya[8].

---

[7] Sandra, Feni. 2013. *Pemekaran Kecamatan Sungai Bremas : Lahirnya Kecamatan Koto Balingka.* Padang : Skripsi FIS UNP

[8] Sulastri. 2013. *Pemekaran Kecamatan Sungai Pagu lahirnya : Pauh Duo di Kabupaten Solok Selatan*. Padang: Skripsi FIS UNP.

Penelitian di atas persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pemekaran wilayah. Perbedaannya adalah studi relevan tentang Pemekaran Kecamatan Sungai Bremas : Lahirnya Kecamatan Koto Balingka yang disebabkan oleh konfilik antara Nagari Air Bangis dengan Nagari Parit yang berawal dari permasalahan antar siswa pelajar dan "Pemekaran Kecamatan Sungai Pagu lahirnya : Pauh Duo di Kabupaten Solok Selatan" yang bertujuan untuk memajukan perkembangan penduduk melalui kegiatan interaksi baik dalam kegiatan pendidikan, maupun dalam kegiatan kesehatan dan sosial lainnya sedangkan penulis meneliti pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah daerah Kecamatan terhadap Nagari-Nagari yang terdapat di Kecamatan Air Pura sehingga membentuk Kecamatan baru yang bernama Kecamatan Air Pura. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik meneliti tentang "*proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan".*

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pemekaran Kecamatan Pancung Soal telah berlangsung sejak tahun 2011. Dalam proses pemekaran terjadi banyak permasalahan termasuk pro dan kontra mengenai pemekaran Kecamatan Pancung Soal namun pada tanggal 13 September 2012 muncul kesepakatan oleh pemerintah dan masyarakat membutuhkan proses yang sangat panjang. Berdasarkan batasan masalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah *Bagaimana proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan kajian sosiologi pedesaan terikat dengan Pemekaran Daerah.
2. Secara praktis untuk sumbangan ide terhadap pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dengan mengembangkan daerahnya.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan mengenai penelitian tentang pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan teori Struktural Fungsional pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Kemunculan Teori Struktural Fungsional dipengaruhi oleh adanya asumsi

kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Asumsi dasar dari Teori Struktural Fungsionalisme yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat Kecamatan Air Pura dari pemekaran merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Teori struktural fungsional Talcott Parson dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistim "tindakan" yang disebut AGIL. Melalui AGIL ini dikembangkan pemikiran struktur dan sistim.

Menurut Parson fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kea rah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan definisi ini Parson yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem yang dinamakan AGIL antara lain :

a. *Adaptation* (adaptasi)

Semua sistem harus menanggulangi semua situasi yang gawat.Sistim harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Masyarakat harus menyesuaikan diri dengan dimekarkan Kecamatan Pancung Soal karena dulunya bersatu sekarang sudah berbeda pemimpinnya aturan juga berbeda masyarakat harus berupaya menyesuaikan agar tercipta kesejahteraan sosial.

b. *Goal attainment* (pencapain tujuan)

Semua sistim mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya. Pemekaran Kecamatan Pancung Soal pemimpin dan masyarakat bekerja sama dalam mencapai tujuan yaitunya menciptakan pembangunan yang merata, mensejahterahkan masyarakatnya dan membuka lapangan kerja.

c. *Integration* (integrasi)

Semua sistim harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistim juga harus mengelola hubungan ketiga fungsi lainnya (A,G,I). Pemerintahan Kecamatan Pancung Soal harus mengolah dan mengatur hubungan dengan masyarakat serta bekerja sama dalam membangun pemabangunan daerahnya agar terlaksana pembanguna yang merata.

d. *Latency* (pemeliharaan pola)

Semua sistim harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptan dan menopang motivasi. Berdasarkan pernyataan diatas pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Air Pura harus mempunyai konsep AGIL tersebut agar terciptan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Apabila ada salah-satu rusak maka akan berakibat pada masyarkat sendiri dan pemimpim dianggap gagal dalam memimpin daerahnya maka masyarakat tersebut akan ketertinggalan dari daerah lain:

1. Tindakan Sosial dan Orientasi Subjektif

Teori Fungsionalisme Struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris,

positivistis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Masyarakat Air Pura dari pemekaran memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma.

Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu masyarakat Kecamatan Air Pura dari pemekaran sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga masyarakat Kecamatan Air Pura dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Perlu diketahui pula bahwa tindakan individu tersebut dalam

realisasinya dapat berbagai macam karena adanya unsur-unsur sebagaimana dikemukakan di atas.

2. Analisis Struktural Fungsional dan Diferensiasi Struktural

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Teori Struktural Fugsional beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional.

Perlu diketahui ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat Kecamatan Air Pura dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal agar ada kelestarian sistem, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan keadaan latent. Empat persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada di pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura. Berkenaan hal tersebut di atas, empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme tingkat perkembangan evolusioner. Perlu diketahui bahwa sekalipun sejak semula Talcott Parsons ingin membangun suatu teori yang besar, akan tetapi akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan niatnya. Hal tersebut karena adanya penemuan-penemuan mengenai hubungan-hubungan dan hal-hal baru, yaitu yang berupa perubahan perilaku pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk pada sibernetika teori sistem yang umum.

Pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura, dinyatakan bahwa perkembangan masyarakatnya melewati empat proses perubahan struktural, yaitu pembaharuan yang mengarah pada penyesuaian evolusinya Talcott Parsons menghubungkannya dengan empat persyaratan fungsional di atas untuk proses perubahan Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura dari pemekaran.[9]

F. Batasan Konseptual

1. Pemekaran Daerah

Pemekaran secara etimologis dalam berasal dari kata "mekar" yang berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi tambah luas, besar, ramai dan bagus. Menurut istilah pemekaran daerah dipakai sebagai memperhalus bahasa yang menyatakan proses perpisahan atau pemecahan satu wilayah untuk membentuk suatu unit administrasi lokal. Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran secara etimologis berasal dari kata "mekar" yang berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi tambah luas, besar, ramai dan bagus. Menurut istilah pemekaran daerah dipakai sebagai memperhalus bahasa yang menyatakan proses perpisahan atau pemecahan satu wilayah untuk membentuk suatu unit administrasi lokal.

[9] Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2011. *Teori Sosiologi Modren* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman pada pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung wilayah, baik dari segi aspek pelayanan masyarakat, aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek potensi wilayah yang ada. Pemekaran wilayah akan memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat, seperti : lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efesien, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, mempercepat proses pelaksanaan pembangunan disegala bidang kehidupan, mempercepat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, meningkatkan keamanan dan ketertiban, lebih meningkatkan hubungan yang serasi antara pemerintah Nagari, Kecamatan dan Kabupaten[10].

2. Proses

Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah *input* menjadi *output* Kegiatan ini memerlukan alokasi sumber daya seperti orang dan materi. *Input* dan *output* yang dimaksudkan mungkin tangible (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau tidak berwujud (seperti energi atau informasi)[11].

---

[10] Asnan, Gusti. 2004. *Berpisah Untuk Bersatu Dinamika Pemekaran Wilayah Di Sumatera Tengah*: Yogyakarta, Citra Pustaka.

[11]https://id.wikipedia.org/wiki/Proses. Diakses pada tanggal 7 maret 2016

G. Metodologi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kacamatan Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura. Hal ini dilakukan, karena Kecamatan Soal merupakan salah-satu Kecamatan yang baru dimekarkan di Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan untuk kemajuan daerah. Guna dimekarkan Kecamatan Pancung Soal untuk membentuk Kabupaten baru yang bernama yaitu Reneh Indo Jati alasannya Kecamatan yang ada di selatan termasuk Kecamatan Pancung Soal jauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itulah Kecamatan Pancung Soal dibagi dua dengan munculnya Kecamatan baru yaitu Kecamatan Air Pura.

b. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh)[12]. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya[13]. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan

[12]Lexy, Maleong. 1998. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. *hal* 4.
[13]*ibid*

memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu atau sekelompok orang.[15]

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus *intrinsik* maksudnya penelitian studi kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus untuk memberikan pemahaman mendalam agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan *komprehensif* sehingga kasus ini menarik untuk diteliti[14]. Peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perebutan pusat pemerintahan dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura Kabupaten Pasisir Selatan, studi kasus bertujuan untuk mempertahankan keutuhan objek, yang artinya data yang terkumpul dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, studi kasus intrinsikdilakukan untuk memahami secara utuh suatu kasus tanpa harus menghasilkan konsep dan teori. Penelitian *kualitatif* dipilih karena dipandang mampu menemukan definisi serta gejala sosial dari subjek. Berdasarkan permasalahan penelitian, peneliti menggunakan metode studi kasus instrinsik yaitu studi kasus yang dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai masalah perebuta pusat pemeintahan dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Informan Penelitian

Teknik pengambilan informasi dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni menetapkan informan dengan sengaja dan sesuai. Menentukan

[14] Sitorus, Felix. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Bogor: Doksis. Hal 10

siapa yang akan menjadi informan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang dengan kriteria-kriteria seperti: yang terlibat aktif dalam pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan. Kriteria informannya adalah *pertama,* adalah Pemda Pancung Soal yang berjumlah 3 orang, Pemda Kecamatan Air Pura berjumlah 5 orang, *kedua* adalah masyarakat Pancung Soal dan Air Pura berjumlah 16 orang. Total irformannya adalah 24 orang.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat subjektif mungkin. Tujuannya adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktifitas-aktifitas yang berlangsung, orang-orang (aktor) yang terlibat dalam aktifitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Adapun observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif. Dalam hal ini peneliti membatasi diri dalam aktifitas kelompok subjek dan informasi.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi pasif (*passive participation).* Dalam hal ini peneliti datang ketempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti hanya mengamati aktifitas masyarakat. Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal untuk mengamati masyarakat Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura.

Sewaktu melakukan observasi lanjutan peneliti tidak terlihat seperti observer yang sedang mengamati objeknya. Peneliti hanya bertingkah biasa saja, sambil mengamati prilaku objek ketika di lokasi penelitian. Kesulitan yang ditemui ketika observasi yaitu adanya beberapa masyarakat yang menanyakan identitas peneliti. Diyakini individu pada umumnya akan bertingkah laku berbeda bila tahu bahwa mereka akan diamati. Cara seperti itu akan memungkinkan peneliti menangkap kejadian sesungguhnya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 6 Mei 2016 s/d 11 Juli 2016 yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal ketika itu cuaca senang panas banyak orang-orang di sekitar kantor Camat Pancung Soal yang sedang menyelesaikan aktivitas dimulai dari ruang pagar masuk kantor Camat terdapat tiang bendera didepan Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal. Kantor Camat Pancung Soal bersebelahan dengan Kantor Kapolsek Kecamatan Pancung Soal. Ketika peneliti masuk kedalam Kantor Camat Pancung Soal peneliti melihat Pak Camat sedang rapat dengan beberapa anggotanya. Di kantor Camat Pancung Soal terdapat struktur organisasi Kecamatan Pancung Soal dimulai dari sekretaris Kecamatan Pancung Soal, kasubag umum dan kepegawaian, kasubag perencanaan dan pelaporan,kasubag keuangan, kasie pemerintahan dan trantip, kasie pekenomi dan keuangan, kasie kesejahteraan sosial, kasie administrasi dan kependudukan, dan tujuh staf.

Pada saat observasi yang dirasakan peneliti mulai begitu bayak kesulitan pada saat memperoleh informasi dari para informan. Karena Pak Heriyadi selaku Camat Pancung Soal dan beberapa anggotanya sedang

mengadakan rapat dan sibuk dengan urusan masing-masing. Hal ini membuat penelitian menjadi sulit mendapatkan data. Peneliti terus berusaha untuk deapat menemukan data dari bagian struktur pemerintahan dimulai dari sub bagian pemerintahan sampai dengan kependudukan. Adapun keterkaitannya dengan tujuan penelitian adalah mengetahui proses dan pelaksanaan pemekaran Kecamatan Pancung Soal, hal ini bisa dilihat melalui tindakan, aktivitas, tempat dan tempat yang diteliti. Misalnya memperhatikan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dan mayarakat dalam proses dan pelaksanaan pemekaran Kecamatan Pancung Soal.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi berikutnya ke masyarakat Pancung Soal Pada Pagi hari, dimulai dari Pukul 09.00 – 01.00 WIB. Peneliti pun melihat yang membuat kegiatan kemasyarakat setelah pemekaran Kecamatan Pancung Soal seperti kegiatan gotong royong membersihkan jalan dan memperbaiki jalan di Nagari Palokan yang merupakan salah satu nagari Pemekaran Kecamatan Pancung Soal. Di Nagari Tanah Bakali peneliti melihat ada pembangunan jembatan dan pos pelayan pembantu kesehatan di masing-masing Nagari di Kecamatan Pancung Soal dan beberapa mushola dan mesjid.

b. Wawancara

Wawancara digunakan adalah wawancara mendalam dengan masyarakat. Sebagai teknik pengumpulan data dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil. Tujuan melakukan wawancara ini adalah untuk mendengar, mencatat, memahami, secara seksama dan mendetail tentang permasalahan dan

untuk mendapatkan data-data yang kongkret dan akurat mengenai perebutan pusat pemwerintahan dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak melakukan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara sering digunakan untuk penelitian lebih mendalam tentang informan.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara individual. Dalam wawancara pribadi orang-orang yang terlibat hanyalah seorang interviewer dan seorang interview. Wawancara semacam ini dapat memberikan pemeliharaan terhadap hal-hal yang bersifat rahasia (*privacy*) sehingga sangat memungkinkan untuk bisa memperoleh data atau informasi yang intensif.[15]

Melalui wawancara ini peneliti mengumpulkan data atau informasi langsung bertatap muka dengan informan. Pada saat wawancara peneliti menggunakan handphone sebagai alat perekam, setelah melakukan wawancara penulis menulis kembali hasil wawancara agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Sebelum melakukan wawancara peneliti menghubungi informan terlebih dahulu untuk meminta waktu informan untuk wawancara.

[15]Arief, Subyantoro. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: ANDI. *haI* 106.

Wawancara dengan informan dilakukan dengan cara mendatangi keberadaan informan seperti di kantor dan dirumah, atau tempat-tempat yang sudah dijanjikan oleh informan sebelumnya, wawancara yang dilakukan dengan informan berlangsung beberapa kali tergantung kepada kedekatan dan keterbukaan informan menceritakan tentang proses dan pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sewaktu peneliti melakukan wawancara penliti menemukan keunikan dari tiap-tiap informan, sebab dengan wawancara yang tidak formal lebih bebas berekpresi ketika berbicara. Selain itu peneliti juga dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk mendapatkan data informan. Tantangan yang dihadapi peneliti adalah tidak semua peneliti memiliki waktu untuk wawancara dan ada juga informan yang menolak untuk diwawancara, sulitnya menemui informan sperti menemui informan seperti informan yang menjadi pelaku Pemekaran Kecamatan Pancung Soal.

Wawancara dengan informan-informan peneliti ini lebih kurang 3 bulan, dimulai dari bulan Mei s/d Juli 2016. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan wawancara yaitu yang terkait pertanyaan untuk mendapatka informasi, peneliti juga mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan catatan lapangan, untuk melengkapi informasi, peneliti juga menambahkan dengan foto–foto saat wawancara. Pada saat wawancara peneliti menggunakan handphone sebagai alat perekam, setelah wawancara penulis menulis kembali hasil wawancara peneliti menghubungi informan terlebih dahulu untuk meminta waktu informan untuk wawancara. Wawancara dengan informan dilakukan dengan cara

mendatangi keberadaan informan seperti di tempat lokasi Kecamatan Pancung Soal dan masyarakatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini peneliti lakukan sebagai data sekunder dalam penelitian dengan cara mencari dan mempelajari dokukmen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut berupa foto, rekaman, dan catatan wawancara saat berada dilapangan penelitian.

I. Triangulasi Data

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, dapat diuji kebenarannya dan terpercayanya suatu data yang diperoleh dalam penelitian, maka dilakukanlah triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan yang sama yang dikembangkan dari pedoman wawancara terhadap beberapa informan berbeda kemudian dilakukan pengecekan ulang. Data dianggap valid apabila diperoleh data jawaban yang relatif sama dari para informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah peneliti tetapkan dengan pertanyaan yang pada intinya adalah relatif sama untuk pengecekan kebenaran data.

Data dianggap benar apabila dari pertanyaan yang diajukan sudah terdapat jawaban yang relatif sama dari informan yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan kegiatan untuk mengecek data dari sumber atau informan yang berbeda tersebut, sehingga diperoleh keabsahan data. Apabila dengan teknik pengumpulan

data tersebut berbeda-beda, maka peneliti menggali informasi lebih lanjut dengan informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang benar.

J. Analisis Data

Menurut Maleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dilihat dari segi tujuan penelitian, prinsip pokok tujuan kualitatif adalah menemukan teori dari data[16]. Analisis data juga dapat diartikan merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.[17]

Data yang dikumpulkan melalui wawancara disusun dan diolah secara sistematis disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.Analisa data dilakukan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan, setelah data tersebut dipelajari dan ditelaah kemudian dilakukan penafsiran terhadap data, sehingga data tersebut bermakna dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan konsep-konsep yang diduga sebelumnya.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.Ketiga komponen tersebut dilakukan secara bersamaan, maksudnya

---

[16]Moleong Lexi J. 2005. "Metodologi Penelitin Kualitatif ". Bandung: PT Remaja Rosdakarya

[17]Bungin, Burhan. 2001. "Metodologi Penelitian kualitatif aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer". Jakarta: Rajawali Pers. *Hal* : 196.

antar komponen bukan merupakan langkah-langkah hierarki tetapi dapat diulang ke komponen lainnya jika dirasa perlu untuk melengkapi data. Adapun cara analisis data kualitatif dilakukan seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:[18]

a. Reduksi data: Laporan dianalisis sejak dimulainya penelitian. laporan ini perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mencari temanya. Data yang didapat dari lapangan kemudian ditulis dengan rapi, rinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil wawancara dan memudahkan untuk mencarinya jika sewaktu waktu diperlukan. Reduksi data dapat membantu dan memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Dalam proses pengumpulan dan pengelompokan data peneliti akan menggunakan kode-kode dan poin-poin tertentu supaya memperoleh gambaran yang jelas mengenai perebutan pusat pemerintahan dari pemekaran Kecematan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura Kabupen Pesisir Selatan.
b. Display data: Display data adalah menyajikan data dalam bentuk tulisan atau tabel, dengan melakukan display data dapat memberikan gambaran menyeluruh sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan melakukan analisis tentang perebutan pusat pemerintahan dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahap *display* data ini, penulis berusaha menyimpulkan melalui

[22]Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. "Metodologi Penelitian Sosial".Jakarta : Bumi Aksara. *Hal* 85-88.

data yang telah disimpulkan pada tahap reduksi sebelumnya. Agar didapat data-data yang akurat, data-data dikelompokan ke dalam tabel dan tabel ini akan membantu peneliti dalam melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang sudah disimpulkan diperiksa kembali dan dibuat dalam bentuk laporan penelitian atau penyajian data ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penelitian.

c. Penarikan kesimpulan: Dari awal melakukan penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, verifikasi dengan cara berfikir ulang selama melakukan penulisan. Meninjau kembali catatan di lapangan, bertukar pikiran agar bisa mengembangkan data. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban informan mengenai permasalahan penelitian yang sifatnya penting. Jika dirasa sudah sempurna, maka hasil penelitian yang telah diperoleh nantinya akan ditulis dalam bentuk laporan akhir tentang perebutan pusat pemerintahan dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal menjadi Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan.

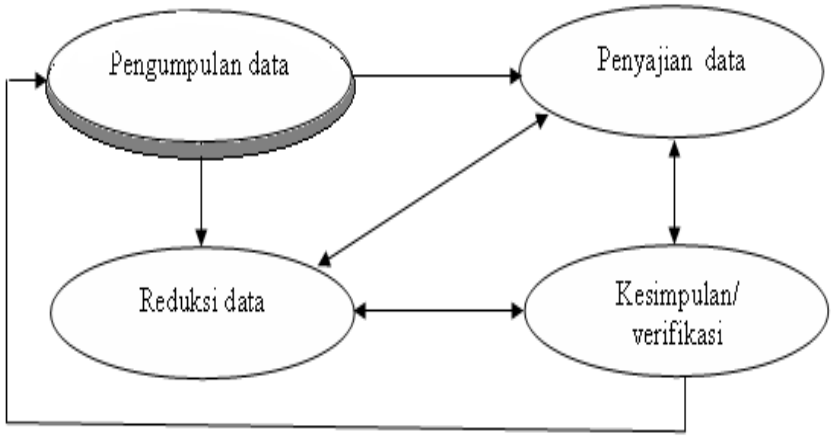

Gambar 1.Skema model analisis data interaktif dari Milles dan Huberm

BAB II
KECAMATAN PANCUNG SOAL DAN KECAMATAN AIR PURA

A. Kecamatan Pancung Soal

1. Sejarah Kecamatan Pancung Soal

Kerajaan Inderapura merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sekarang, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi. Secara resmi kerajaan ini pernah menjadi bawahan (vazal) Kerajaan Pagaruyung. Walau pada praktiknya kerajaan ini berdiri sendiri serta bebas mengatur urusan dalam dan luar negerinya.

Kerajaan ini pada masa jayanya meliputi wilayah pantai barat Sumatera mulai dari Padang di Utara sampai Sungai Hurai di Selatan. Produk terpenting Inderapura adalah lada, dan juga emas. Inderapura dikenal juga sebagai Ujung Pagaruyung. Melemahnya kekuasaan Pagaruyung selama abad ke-15, beberapa daerah pada kawasan pesisir Minangkabau lainnya, seperti Inderagiri, Jambi, dan Inderapura dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Namun perkembangan Inderapura baru benar-benar dimulai saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Arus perdagangan yang tadinya melalui Selat Malaka sebagian besar beralih ke pantai Barat Sumatera dan Selat Sunda. Perkembangan dan ekspansi Inderapura terutama ditunjang oleh lada.

Kapan tepatnya Inderapura mencapai status negeri merdeka tidak diketahui dengan pasti. Namun diperkirakan, ini bertepatan dengan mulai maraknya perdagangan lada di wilayah tersebut. Pada pertengahan abad keenam belas didorong usaha penanaman lada batas selatan Inderapura mencapai Silebar

(sekarang di Provinsi Bengkulu). Pada masa ini Inderapura menjalin persahabatan dengan Banten dan Aceh.

Saat Kesultanan Aceh melakukan ekspansi sampai wilayah Pariaman. Inderapura menghentikan ekspansi tersebut dengan menjalin persahabatan dengan Aceh melalui ikatan perkawinan antara Raja Dewi, putri Sultan Munawar Syah dari Inderapura, dengan Sultan Firman Syah, saudara raja Aceh saat itu, Sultan Ali Ri'ayat Syah (1568-1575). Lewat hubungan perkawinan ini dan kekuatan ekonominya Inderapura mendapat pengaruh besar di Kotaraja (Banda Aceh), bahkan para hulubalang dari Inderapura disebut-sebut berkomplot dalam pembunuhan putra Sultan Ali Ri'ayat Syah, sehingga melancarkan jalan buat suami Raja Dewi naik tahta dengan nama Sultan Sri Alam pada 1576. Walau kekuasaannya hanya berlangsung selama tiga tahun sebelum tersingkir dari tahtanya karena pertentangan dengan para ulama di Aceh. Namun pengaruh Inderapura terus bertahan di Kesultanan Aceh, dari 1586 sampai 1588 salah seorang yang masih berkaitan dengan Raja Dewi, memerintah dengan gelar Sultan Ali Ri'ayat Syah II atau Sultan Buyong, sebelum akhirnya terbunuh oleh intrik ulama Aceh.

2. Kondisi Geografis dan Demografis

Kecamatan Pancung Soal terletak pada $100° 49′41" - 101°09′41"$ Bujur Timur dan $1° 40′10" - 2° 10′10"$ Lintang Selatan. Kecamatan pancung soal berbatasan dengan Kecematan Linggo Sari Baganti (Utara) berbatasan dengan Kecamatan Basa Ampek Balai (Selatan) berbatasan dengan samudra Hindia (Barat) dan sebelah Timur berbatasan dengan Hutan TNKS.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Pancung Soal

NO	NAMA	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	JUMLAH
	NAGARI/KAMPUNG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		KK
1	***Kudo-Kudo***				
	a. Kampung Kepala bandar	292	323	615	113
	b. Kampung Kudo-Kudo	1036	1185	2221	504
	Jumlah	**1863**	**1508**	**2836**	
2	***Inderapura Selatan***				
	a. Kampung Sungai Gemuruh	1044	1955	3039	312
	b. Kampung Sungai Guyung	819	790	1609	500
	Jumlah	**1863**	**2785**	**2785**	
3	***Tigo Sungai***				
	a. Kampung Sungai Aqsa	499	551	1050	234
	b. Kampung Rimbo Panjang	465	526	991	250
	Jumlah	**965**	**1077**	**2041**	
4	***Inderapura***				
	a. Kampung Hilalang	346	368	714	172
	b. Kampung Berok	216	222	438	125
	c. Kampung Panamban	267	272	539	160
	Jumlah	**829**	**862**	**1691**	
5	***Simpang Lama***				
	a. Kampung Pandakian	555	674	1229	294
	b. Kampung Rawa Gemulau	505	635	1140	275
	Jumlah	**1060**	**1309**	**2369**	
6	***Tigo Sepakat***				
	a. Kampung Embacang Limus	262	248	510	126
	b. Kampung Geti Mudik	262	269	531	120
	c. Kampung Geti Hilir	365	417	782	181
	Jumlah	**889**	**934**	**1823**	
7	***Inderapura Tengah***				
	a. Kampung Pasar Malintang	458	427	885	277
	b. Kampung Gelung	544	517	1061	238
	Jumlah	**1002**	**944**	**1946**	
8	***Muaro Sakai***				
	a. Kampung Muaro Sakai	795	787	1582	256
	b. Kampung Muaro Gedang	125	121	246	56
	c. Kampung Batang Silaut	309	355	664	150
	d. Kampung Tanjung Medan				
	Jumlah	**1229**	**1263**	**2492**	
9	***Inderapura Barat***				
	a. Kampung Basar	624	636	1258	335

	Gedang	646	656	1302	869
	b. Kampung Tanjung Batang kapas				
	Jumlah	**1270**	**1290**	**2560**	
10	***Tluk Ampalu***				
	a. Kampung Pulau Makan	581 577	495 431	1076 1008	325 238
	b. Kampung Air Terjun	**1158**	**926**	**2084**	
	Jumlah				
	Jumlah	**11.592**	**12.898**	**24.490**	

Sumber : Data dokumentasi yang didapat dari arsip kantor Kecamatan Pancung Soal

Berdasarkan tabel diatas terdapat 10 Nagari yang ada di Kecamatan Pancung Soal yang terdiri dari 24 kampung. Nagari tersebut dimulai dari Nagari Kudo-kudo Inderapura, Inderapura Selatan, Tigo Sungai Inderapura, inderapura, Simpang Lama Inderapura, Tiga Sepakat Inderapura, Inderapura Tengah, Muara Sakai Inderapura, Inderapura Barat dan Tluk Amplu Inderapura. kampunya terdiri dari Kampung Kepala Bandar, Kampung Kudo–kudo, Kampung Sungai Gemuruh, Kampung Sungai Kuyung, Kampung Sungai Angsa, Kampung Rimbo Panjang, Kampung Hilalang, Kampung Berok, Kampung Panambam, Kampung Pendakian, Kampung Rawa Gemulau, Kampung Embacang Limus, Kampung Geti Mudik, Kampung Geti Hilir, Kampung Pasar Melintang, Kampung Celung, Kampung Muaro Sakai, Kampung Gedang, Kampung Batang Silaut, Kampung Tanjung Medan, Kampung Pasar Gedang, Kampung Tanjung Batang kepas, Kampung Pulau Makan dan Kampung Air Terjun.

Jumlah kartu keluarga yang ada di Kecamatan Pancung Soal berjumlah 7.314 buah kartu keluarga. Jumlah penduduk laki-lakinya 11.592 orang dan penduduk perempuannya berjumlah 12.898 orang dengan total 24.410 orang. Penduduk yang paling banyak terdapat di Nagari Inderapura Selatan dengan

jumlah penduduknya 4.648 orang dengan berjumlah 812 Kartu Keluarga. Penduduk paling sedikit terdapat di Nagari Inderapura berjumlah 1.691 orang dengan berjumlah 457 Kartu Keluarga.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan

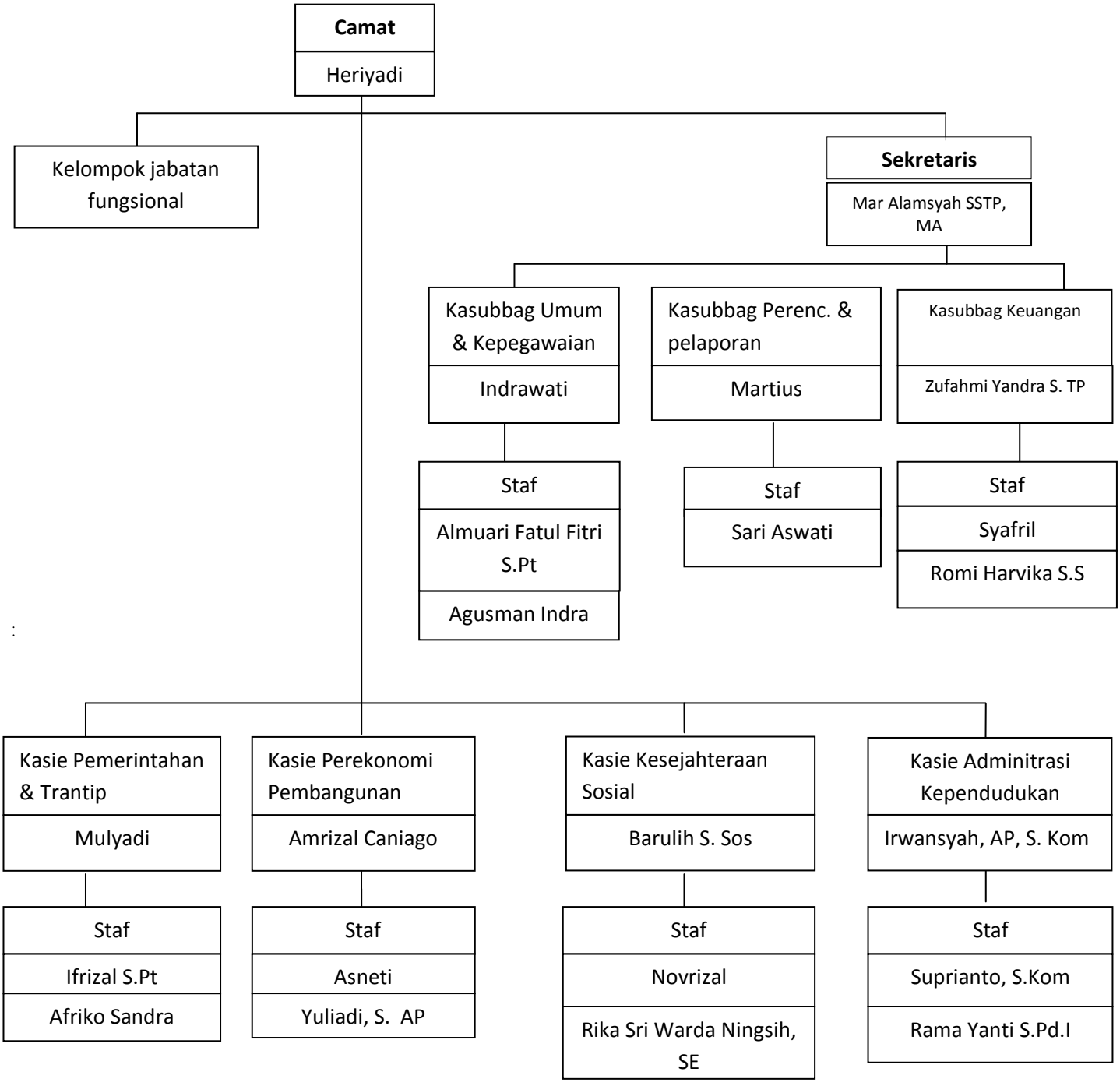

Sumber : Data dokumentasi yang didapat dari arsip kantor Kecamatan Pancung Soal

Pada bagan di atas Organisasi Pemerintah Kecamatan Pancung Soal dipimpin oleh seorang camat yang bernama bapak Heriyadi S.Sos, dan Sekretarisnya Mar Alamsyah SSTP, MA. Pada bidang sekretaris dibantu oleh 3 bidang lainnya yaitu Kasubbag Umum & Kepegawaian, Kasubbag Perenc. & pelaporan,serta Kasubbag Keuangan. Bidang Kasubbag Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Indrawati serta memiliki 2 orang staff yaitu Almuari Fatul Fitri S.Pt dan Agusman Indra. Bidang Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Bapak Martius dan di bantu oleh seorang staff yang bernama Sari Aswati. Pada Bidang Kasubbag Keuangan dipimpin Zulfahmi Yandra, S.TP dengan staff Syafril dan Romi Harvika S.S. dalam mengatur organisasi pemerintahan Kecamatan Pancung Soal, camat memiliki 4 Kasie yaitu Kasie Pemerintahan & Trantip, Kasie Perekonomi Pembangunan, Kasie Kesejahteraan Sosial, dan Kasie Adminitrasi Kependudukan. Kasie Pemerintahan & Trantip dipimpin oleh bapak Mulyadi dan dibantu 2 orang staff yaitu Ifrizal S.Pt dan Afriko Sandra, Kasie Perekonomi Pembangunan dipimpin oleh bapak Amrizal caniago dengan dibantu 2 orang staffnya yaitu Asniati dan Yuliadi S.AP, Kasie Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh bapak Barulih S.Sos dengan 2 staff yaitu Nofrizal dan Rika Sari Warda Ningsih, SE, dan Kasie Adminitrasi Kependudukan dipimpin oleh bapak Irwansyah, AP,S.Kom dengan 2 orang staff yang bernama bapak Suprianto S.Kom dan Rama Yanti, S.Pd.I.

B. Kecamatan Air Pura

1. Sejarah Kecamatan Air Pura

Pada tahun 2011 terjadi Pemekaran 8 Nagari, yang mana sebelumnya tahun 2011 nagari yang ada di Kecamatan Pancuang Soal hanya satu yaitu namanya nagari Indrapura. Nagari Inderapura Sangat luas, untuk itu dipecah lagi menjadi 8 Nagari lagi, sebab kurang terurus oleh satu wali nagari (kepala desa). Diantaranya Nagari tersebut adalah Inderapura Selatan, Inderapura Utara, Indera Pura Barat, Muaro sakai Inderapura, Inderapura Timur, Kuda-kuda Inderapura, Tiga Sepakat Inderapura.

Pada tahun awal 2012 dimekarkan lagi (ditambah) 12 Nagari yaitunya Tiga sungai Inderapura, simpang Lamo Inderapura, Indera Pura Tengah, Teluk Amplu Inderapura, Teluk Kualo Inderapura, Palokan Indera Pura, Damar Delapan Batang inderapura, Muara Inderapura, Pulau Rajo Inderapura, Lubuk Betung Iderapura, Tanah Bakali Inderapura, Lalang Panjang inderapura. Guna dimekarkan 12 nagari tersebut untuk memekarkan Kecamatan Pancung Soal menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura sebagai Kecamatan Pemekaran.

Kecamatan Air Pura dapat SK dari Pemerintah Daerah dari Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 13 september 2013. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2012 BAB II Pasal 2 tentang pembentukan Kecamatan Air Pura Kecamatan Air Pura terdiri dari 10 nagari dintaranya: Inderapura Utara, Muara Inderapura, Damar Lapan Inderapura, Lalang Panjang Indera Pura, Palokan

Inderapura, Lubuk Betung Inderapura, Teluk Kualo Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Inderapura Timur dan Pulau Rajo Indera Pura.

Sedangkan yang termasuk kedalam Nagari Kecamatan Pancung soal sebagai Kecamatan Induk diantaranya: Inderapura, inderapura Selatan, Inderapura barat, Muara Sakai Inderapura, Kudo-Kudo Inderapura, Tiga Sepakat Inderapura, Tiga Sungai Inderapura, Simpang Lama Inderapura, Inderapura tangah dan Tluk Amplu Inderapura.

2. Letak dan Luas Wilayah

Luas daerah Kecamatan Air Pura adalah sebesar 314 Km^2 atau 5,46 % dari luas Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Air Pura merupakan pecahan dari Kecamatan Air Pura yang terdiri dari 10 Nagari yaitu Inderapura Timur, Inderapura Utara, Pulau Rajo Inderapura, Tluk Kualo Inderapura, Palokan Inderapura, Tanah Bekali Inderapura, Lubuk Betung Inderapura, Damar Lapan Inderapura, Muara Inderapura, dan Lalang Panjang Inderapura. Dari sepuluh Nagari tersebut terbagi ke dalam 20 kampung.

Kecamatan Air pura adalah sebuah Kecamatan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif wilayahnya adalah sebagian wilayah Nagari Inderapura yang merupakan pusat Kerajaan Inderapura.

Batas-batas wilayah Kecamatan Air Pura yaitu :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Topografi daerah Kecamatan Air Pura adalah datar dan berbukit-bukit sebagai perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 2-15 meter. Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan, Air Pura sampai saat ini masih diliputi oleh kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Air Pura ini mencapai 17,64% dari luas daerah. Lahan untuk budidaya pertanian tercatat sekitar 13,26%. Sementara lahan untuk perumahan/pemukiman dan halaman sekitarnya hanya tercatat sebesar 1,46 %. Sisanya yaitu sebesar 28,53% terdiri dari lahan kering dan lainnya.

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Air Pura tahun 2012 tercatat sekitar 14.803 jiwa terdiri dari 7.450 jiwa laki-laki dan 7.353 jiwa perempuan serta 3.442 kepala rumah tangga dengan kepadatan penduduk 47,34 jiwa per Km^2.

4. Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Kecamatan Air Pura memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan baru sebagian kecil yang di manfaatkan oleh masyarakat, pada umumnya dipergunakan untuk ladang sawit dan sawah, dan sebagian lagi digunakan untuk infrastruktur perkantoran dan pasar serta keperluan lain bagi masyarakat. Aktifitas ekonomi di Kecamatan Air Pura cukup tinggi telah membuka peluang ekonomi dibidang pertanian mulai dari usaha dagang dan warung sampai ke minimarket yang menjual alat pertanian.

Tanaman perkebunan rakyat yang paling banyak diusahakan masyarakat di Kecamatan Air Pura adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, karet, kayu manis, cengkeh, pinang, kelapa hibrida, dan nilam. Masing-masing produksi tanaman tersebut pada tahun 2016, kelapa sawit (4.266 ton), kelapa (924 ton), kayu manis (426,75 ton), cokelat (73,70 ton) dan pinang (72,05 ton).

Dari uraian di atas terhitung kelapa sawit yang paling banyak penghasilan pendapatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Air Pura. Sebagaimana informasi dari masyarakat kecamatan Air Pura, sektor pertanian merupakan mata pencarian utama mereka, selain pertanian masyarakat yang bermukim di sepanjang jalan raya membuka usaha dagang, mulai dari toko kecil, rumah makan, bengkel dan wisma.

5. Agama

Jumlah penduduk Air Pura menurut agama yang dianut tercatat sebanyak 14,864 penduduk beragama Islam. Demikian juga dengan sarana ibadah yang ada tercatat mesjid sebanyak 37 buah mesjid, musholah 56 buah.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan

Klasifikasi atau kategori Lembaga Ketahanan Masyarakat Nagari (LKMN) adalah 1 (satu). Tetapi klasifikasi atau kategori ini belumlah bersifat standar karena belum ada aturan baku dari pemerintahan.

Kualitas Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kecamatan Air Pura masih sedikit. Jumlah pegawai negeri sipil di

kantor Air Pura tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang, dimana terdiri dari 4 orang tamatan SLTA dan 6 orang tamatan Akademi/perguruan tinggi.

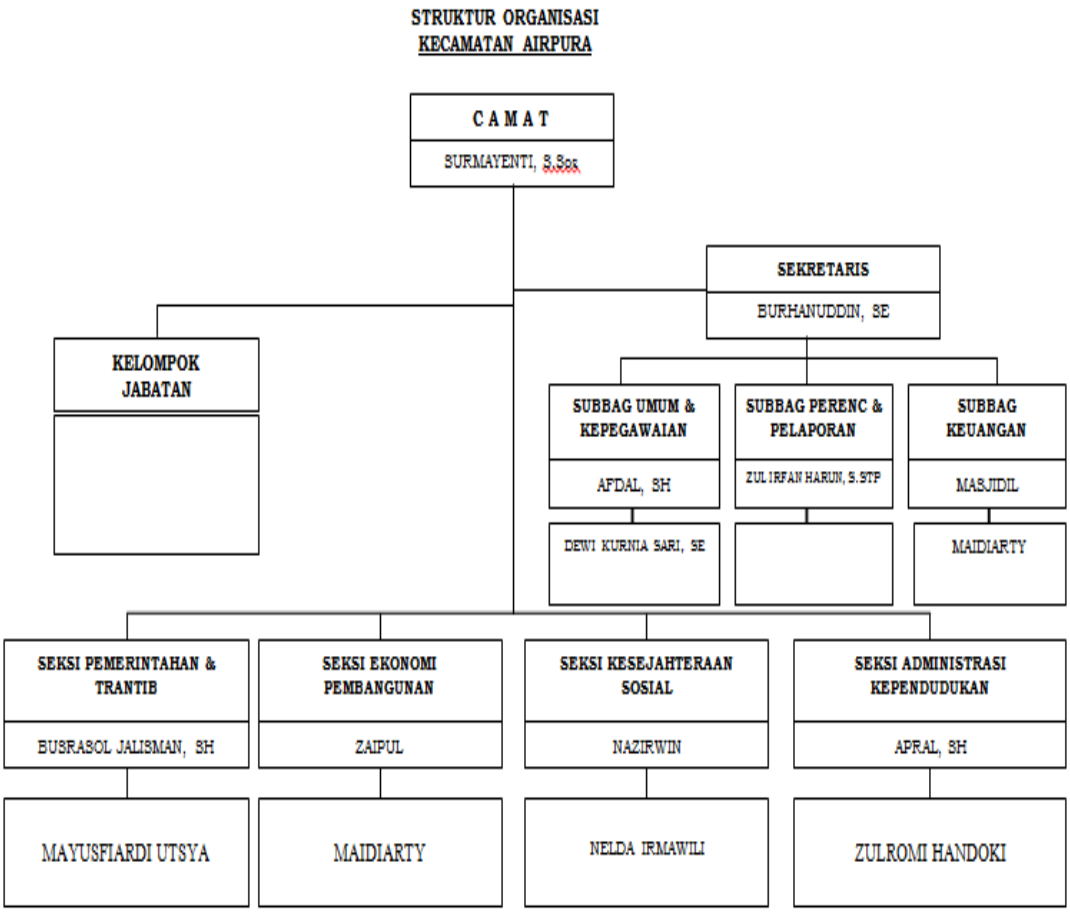

Sumber : Data dokumentasi yang didapat dari Kebag. Pemerintahan Kecamatan Pancung Soal

Pada bagan diatas Kecamatan Air Pura yang dipimpin oleh seorang camat yang bernama Buk Surmayenti S.Sos, dan Sekretarisnya Burhanudin, SE. Pada bidang sekretaris dibantu oleh 3 bidang lainnya yaitu Kasubbag Umum & Kepegawaian, Kasubbag Perenc. & pelaporan,serta Kasubbag Keuangan. Bidang Kasubbag Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Afdal SH serta memiliki seorang staff yaitu Dewi Kurnia Sari, SE. Bidang Kasubbag Perencanaan dan

Pelaporan dipimpin oleh Zul Irfan Harun Kasubbag Keuangan dipimpin Masjidil dengan staffnya Syafril Maidiarty.

Dalam mengatur organisasi pemerintahan Kecamatan Pancung Soal, camat memiliki 4 Kasie yaitu Kasie Pemerintahan & Trantip, Kasie Perekonomi Pembangunan, Kasie Kesejahteraan Sosial, dan Kasie Adminitrasi Kependudukan. Kasie Pemerintahan & Trantip dipimpin oleh Pak Busrasol Jalisman, SH dan dibantu seorang staff yaitu Mayusfiardi Utsya, Kasie ekonomi Pembangunan dipimpin oleh bapak Zaiful dengan dibantu seorang staffnya yaitu Maidiarty, Kasie Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh bapak Nazirwin dengan seorang staff yaitu Nelda Irmawili dan Kasie Adminitrasi Kependudukan dipimpin oleh bapak Afral, SH dengan seorang staff yang bernama Zulromi Handoki.

7. Pendidikan

Kecamatan Air Pura memiliki 12 sekolah dasar (SD)5 sekolah menengah pertama (SMP) 1 sekolah menengah atas (SMA) seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Sekolah Yang Ada Di Kecamatan Air Pura

No	**Nama Satuan Pendidikan**	**Alamat**	**Kenagarian**
1	SDN 01 Air Pura	Lubuk Ubai	Tanah Bakali
2	SDN 02 Air Pura	Pasir Ganting	Teluk Kualo Inderapura
3	SDN 03 Air Pura	Koto Pandan Inderapura	Inderapura Timur
4	SDN 04 Air Pura	Lalang Panjang	Lalang Panjang

5	SDN 05 Air Pura	Kampung Dalam Transad	Lubuk Betung
6	SDN 06 Air Pura	Damar Rumput	Tanah Bakali
7	SDN 07 Air Pura	Hilalang Panjang	Damar Lapan Batang
8	SDN 08 Air Pura	Kampung Dalam Transad	Lubuk Betung
9	SDN 09 Air Pura	Rimbo Lumang	Teluk Kualo Inderapura
10	SDN 10 Air Pura	Koto Pandan	Inderapura Timur
11	SDN 11 Air Pura	Jl. Gunung Pungguk Lubuk Ubai	Tanah Bakali
12	SDN 12 Air Pura	Kampung Tamuan Upt Inderapura	Palokan Inderapura
13	SMP N 1 Air Pura	Transad Inderapura	Indera Pura Utara
14	SMP N 2 Air Pura	Jl. Tandikek Kt. Pandan	Koto Pandan Indera Pura
15	SMP N 3 Air Pura	Pasir Ganting	Pulau Rajo
16	SMP N 4 Air Pura	Rimbo Lumang	Teluk Kualo
17	SMP N 5 Air Pura	Sasok Bakir	Inderapura Utara
18	SMAN 1 Air Pura	Jl. Hilalang Panjang	Lalang Panjang

Sumber : Data yan didapat dari Kasubag Umum & Kepegawaian.

Berdasarkan tabel di atas Sekolah Dasar terdapat di Nagari Tanah Bakali, Teluk Kualo Inderapura, Inderapura Timur, Lalang Panjang, Lubuk Betung, Damar Lapan Batang, Teluk Kualo Inderapura, Inderapura Timur, Palokan Inderapura, Inderapura Timur. Sekolah menengah pertama terdapat di Nagari Inderapura Utara, Koto Pandan Inderapura, Pulau Rajo, Teluk Kualo dan Inderapura Utara. Sedangkan Sekolah Menengah Atas terletak di Nagari Lalang Panjang.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan, dari hasil temuan yang peneliti dapatkan ada 3 tahap proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu a). tahap sosialisasi, Sosialisasi yang terjadi dalam proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal yaitu 1). Dimulai dengan diadakan penyebaran surat edaran Pemerintah Kecamatan ke kantor walinagari yang ada di Kecamatan Pancung Soal tentang pemekaran Kecamatan Pancung Soal pada tahun 2011, 2). Pemda Kecamatan Pancung Soal mengumpulkan Wali Nagari, Kaum Adat, Niniak Mamak dan masyarakat untuk meminta persetujuan pada 12 September 2011.

Proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal yang ke b). Tahap musyawarah terjadi tiga kali diantaranya adalah 1). musyawarah pro dan kontra tentang pemekaran Kecamatan Pancung Soal, Kaum Adat dijelaskan tujuan pemekaran dari pemekaran Kecamatan Pancung Soal untuk pembangunan daerah bukan untuk memecah-belah masyarakat setelah dijelaskan Kaum Adat paham dan mau menyetujui untuk pemekaran Kecamatan Pancung Soal. 2). Musyawarah persetujuan kesepakatan pemekaran Kecamatan Pancung Soal, dilakukan untuk meminta persetujuan dari Wali Nagari, Kaum Adat dan Niniak Mamak dan Masyarakat, 3). Musyawarah penetapan pusat tempat pusat Pemerintahan Kecamatan Air Pura se, pada awalnya Pusat Pemerintahan Kecamatan diletakkan di Nagari Palokan sehingga diukur tanah dan tempatnya terletak disamping mesjid

disebelah Kantor KUA Kecamatan Pancung Soal. Kemudian dipindahkan ke Nagari Tanah Bakali karena tanah dan luasnya tidak mencukupi

Proses pemekaran Kecamatan Pancung Soal yang ke c). Tahap pemekaran, setelah mereka setuju masyarakat pun mendukung sehingga terjadi pemekaran dari 1 Nagari ke 8 Nagari, dari 8 Nagari menjadi 20 Nagari sehingga berjumlah 20 Nagari di Kecamatan Pancung Soal yaitu nagarinya adalah Tiga Sungai Inderapura, Simpang Lamo Inderapura, Inderapura Tengah, Tluk Amplu Inderapura, Tluk Kualo Inderapura, Palokan Indera Pura, Damar Delapan Inderapura, Muara Inderapura, Pulau Raja Inderapura, Lubuk Batang Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Lalang Panjang Inderapura. Peride 2013 dapat SK(surat keputusan) dari Pemda Kabupaten Pesisir Selatan). Dengan dimekarkan Kecamatan Pancung Soal muncul dampak pemekaran Kecamatan Pancung Soal diantaranya berkembang masalah sosial kemasyarakatan dengan positif, memicu pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, mengundang masyarakat luar berinvestasi, harga lahan tanah meningkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **,** perubahan yang muncul sejak pemekaran Kecamatan Pancung Soal diantaranya adalah tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat di bidang usaha kecil, usaha rumah tangga, dan usaha menengah dengan usaha CP (yang berizin). Memicu perkembangan pendidikan dengan didirikannya penambahan sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama. Berkembang pendapatan Nagari yang bersumber dari pemerintah pusat yang dulunya hanya dapat dari 1 Nagari, 8 Nagari dan sekarang 20 Nagari.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan, Peneliti memberikan saran:

1. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat selalu bekerjasama untuk pembangunan daerah Kecamatan Pancung Soal sehingga terciptalah pembangunan yang merata agar tidak tertinggal dari daerah lain.
2. Kepada Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan administrasi masyarakat di Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura agar mempermudahkan keperluan masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan dan menggali potensi daerah demi terwujudnya perekonomian yang baik.
4. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para peneliti lain yang ingin melakukan analisis lebih mendalam tentang dampak pemekaran Kecamatan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang pemekaran kecamatan Air Pura serta dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait untuk memperbaiki kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah, 2008. Jakarta : Sinar Grafika

Arief, Subyantoro. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta : ANDI. *haI* 106

Asnan, Gusti. 2004. *Berpisah Untuk Bersatu Dinamika Pemekaran Wilayah Di Sumatera Tengah*: Yogyakarta, Citra Pustaka.

Bakarudin. 2012. *Pengantar Geografi Kota dan Desa*. Padang : Jurusan Pendidikan Geografi.

Bernard Roho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modren.* Jakarta*:* Prestasi Pustaka. Halaman 78-80

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian kualitatif aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta : Rajawali Pers. *Hal* : 99 dan 196

Deddy, Supriady dan Sobbin, Dadang 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Daerah*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.

MPaul Jhonson, Doyle. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modren Jilid II*. Jakarta : PT. Gramedia

George Ritser. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT. Raja Gravindo Persad. Halaman 155

Haw, Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ibid

Lexy J, Maleong. 1998. "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. *hal* 4.

Lexy J, Moleong. 2005. *Metodologi Penelitin Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sitorus, Felix. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Bogor: Doksis. Hal 10

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. *Hal* 312.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. *Hal* 85-88.

Http://www.*defenisi pemekaran Kecamatan Air Pura, birokrasi kompasiana.com.* Diakses pada tanggal 7 maret 2014 jam 14.30

Skripsi

Sandra, Feni. 2013. *Pemekaran Kecamatan Sungai Bremas : Lahirnya Kecamatan Koto Balingka.* Padang : Skripsi FIS UNP

Sulastri. 2013. *Pemekaran Kecamatan Sungai Pagu lahirnya : Pauh Duo di Kabupaten Solok Selatan*. Padang: Skripsi FIS UNP.

Internet

Http://www.*defenisi pemekaran Kecamatan Air Pura, birokrasi kompasiana.com.* Diakses pada tanggal 7 maret 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses